

September 2002

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TENGAH GLOBALISASI: ADAKAH HARAPAN?

Hira Jhamtani

Aktivis Lingkungan, hira.jhamtani@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Jhamtani, Hira (2002) "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TENGAH GLOBALISASI: ADAKAH HARAPAN?," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 5 : No. 1 , Article 1.

DOI: 10.7454/global.v5i1.203

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol5/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TENGAH GLOBALISASI: ADAKAH HARAPAN?

Hira P. Jhamtani

Abstract

Following a decade after the Rio Summit 1992, two central questions are constantly on debate concerning the paradigm of development. Firstly, is there a significant change in the paradigm of development as an impact of the Rio Summit? Secondly, does the WSSD have the capacity on leading the world in the implementation of sustainable development? This article describes problems that occur post-Rio Summit 1992, gives analysis of results produced by the WSSD, and ponders on the prospects of sustainable development in the future.

Pendahuluan

Perhelatan besar tingkat dunia yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan baru saja berakhir di Johannesburg, Afrika Selatan. Perhelatan yang diberi tajuk Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan atau *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tersebut berlangsung tanggal 26 Agustus hingga 4 September 2002, setelah melalui perundingan panjang sejak November 2001. KTT tersebut diadakan untuk memperingati sepuluh tahun KTT Bumi (*United Nations Conference on Environment and Development* atau *UNCED*) di Rio de Janeiro, Brazil pada Juni 1992.

Seperti diketahui, KTT Bumi 1992 merupakan tonggak sejarah global di mana para pemimpin negara-negara anggota PBB mendeklarasikan komitmen mereka pada pelak-

sanaan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan integrasi tiga pilar: pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan. KTT Bumi menghasilkan dokumen Agenda 21 (cetak biru bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan), Deklarasi Rio (27 prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi komitmen politik menyertai pelaksanaan Agenda 21)), Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, Kerangka Konvensi Perubahan Iklim serta pernyataan prinsip-prinsip kehutanan. Kesemuanya dimaksudkan sebagai kerangka kebijakan untuk memastikan pembangunan yang lebih adil dan lestari pada abad ke 21.

Sepuluh tahun kemudian, melalui Resolusi Majelis Umum No. Res.A/55/199, PBB mengadakan WSSD dengan tiga tujuan utama: melakukan tinjauan terhadap pelaksana-

an Agenda 21, menghidupkan kembali komitmen politik bagi pelaksanaan Agenda 21, dan menghasilkan dokumen rencana aksi dengan target waktu yang jelas serta sarana implementasi yang mantap.

Berkaitan dengan hal tersebut maka ada dua pertanyaan mendasar. Pertama, apakah setelah KTT Bumi 1992 ada perubahan di dalam paradigma pembangunan? Kedua, apakah WSSD mampu menuntun dunia pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya? Tulisan ini mengurai-kan masalah pada pasca KTT Bumi, analisis hasil WSSD serta prospek pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen hasil KTT Bumi mencerminkan visi jangka panjang tentang pembangunan yang bertumpu pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial manusia dengan kemampuan sumber daya bumi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Namun, sepuluh tahun kemudian, kemajuan berlangsung lambat dan dalam beberapa hal kondisinya lebih buruk daripada sepuluh tahun yang lalu.¹

Hal di atas adalah pendapat PBB. Kenyataan menunjukkan bahwa mungkin hampir tidak ada kemajuan di bidang pembangunan berkelanjutan. Angka-angka berikut ini mencerminkan hal tersebut²:

- Emisi karbon dioksida (gas rumah kaca) global meningkat lebih dari sembilan persen dalam 10 tahun
- Kawasan hutan menciut 2,2% sejak 1990
- Sekitar 27% terumbu karang rusak berat karena pencemaran, pemanasan air laut, penambangan dan penangkapan ikan; sepuluh tahun lalu hanya 10% yang rusak.
- Dekade 1990-an ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa – menambahkan lebih dari US\$10 trilyun per tahun pada ekonomi global. Tetapi jumlah masyarakat miskin tidak berubah banyak, sekitar 1 milyar orang.
- Masyarakat di negara kaya kini punya masa hidup lebih panjang dari sebelumnya, tetapi sekitar 14.000-30.000 orang mati setiap tahun di negara Selatan karena penyakit yang ditularkan lewat air.
- Belanja untuk bantuan luar negeri menciut dari US\$69 milyar pada 1992 menjadi \$53 milyar pada 2000. Sementara beban hutang negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi (Eropa Timur) meningkat 34% sejak KTT Bumi menjadi US\$2,5 trilyun pada 2000
- Sementara UNEP (program lingkungan PBB) harus berjuang dengan anggaran hanya US\$100 juta, belanja militer di seluruh dunia mencapai lebih dari US\$2 milyar per hari.

Data di atas menunjukkan bahwa krisis lingkungan dan sosial masih melanda dunia padahal pada KTT Bumi 1992 masyarakat dunia sudah mengakui krisis tersebut dan menyatakan komitmen untuk mengatasinya. Artinya, pelaksanaan komitmen Rio belum efek-

¹ Ecosoc, 2002. Report of the Secretary General on Implementing Agenda 21. Commission on Sustainable Development acting as the Preparatory Committee for WSSD. United Nations Economic and Social Council.

² World Watch Institute, 2002. State of the World Report 2002. Washington DC

tif. PBB, melalui laporan Sekretaris Jenderal WSSD, menyatakan ada kesenjangan di dalam implementasi, yang nampak jelas dalam empat bidang³.

Yang pertama adalah bahwa pendekatan terhadap pembangunan berkelanjutan masih terfragmentasi, di mana integrasi ketiga pilar (ekonomi, sosial dan lingkungan) belum dilaksanakan, baik pada tingkat kebijakan maupun program. Kedua, belum ada perubahan berarti di dalam pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Ketiga, belum ada kebijakan atau pendekatan yang menyeluruh dalam bidang keuangan, perdagangan, investasi, teknologi dan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam era globalisasi, koherensi bidang-bidang tersebut menjadi amat penting. Keempat, sumber daya keuangan yang diperlukan bagi implementasi Agenda 21 tidak mencukupi, sementara tidak ada perbaikan dalam alih teknologi.

Sementara itu, pihak-pihak lain, terutama kelompok organisasi non-pemerintah (Ornop) menyatakan persoalan mendasar bukanlah hanya kesenjangan antara visi Rio dengan pelaksanaannya. Menurut Khor (2001)⁴ ada beberapa kelemahan mendasar dari hasil KTT Bumi 1992 yaitu:

a) Negara maju (Utara) enggan atau tidak mampu membuat komitmen yang jelas menuju reformasi hubungan atau struktur ekonomi internasional, atau mempelopori sebuah dialog baru antara Utara-Selatan. Artinya, persoalan ketidakadilan ekonomi

global yang membebani Selatan tidak dipecahkan dan hanya direduksi menjadi janji untuk menyediakan "sumber dana baru dan tambahan". Padahal, komitmen itu bukan baru melainkan komitmen lama untuk menyediakan 0,7% GNP Utara sebagai bantuan kepada Selatan. Persoalan hutang, transfer sumber daya Selatan ke Utara (dalam bentuk pembayaran hutang dan harga komoditi Selatan yang murah) serta pola perdagangan yang tidak adil sama sekali diabaikan dalam perundingan KTT Bumi.

b) Walaupun ada janji mengadakan alih teknologi (terutama teknologi yang ramah lingkungan) ke Selatan, negara Utara sebenarnya tetap memegang teguh rejim perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) guna melindungi perusahaan multinasional mereka. Hal ini membuat transfer teknologi dengan syarat lunak sulit untuk dilaksanakan.

c) KTT Bumi mengabaikan pentingnya mengatur perusahaan multinasional secara hukum agar menjadi bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan degradasi sosial yang ditimbulkan oleh praktik mereka. Bahkan tidak ada satupun proposal bagi tindakan untuk mendisiplinkan perilaku MNC yang justru adalah pelaku utama ekonomi yang seringkali menimbulkan pencemaran dan penipisan sumber daya alam. Lebih jauh lagi, pada saat yang hampir bersamaan dengan KTT Bumi, *the UN Centre for Transnational Corporations* dibubarkan, padahal ini adalah satu-satunya badan PBB yang bertugas memantau MNC dan menyiapkan lan-

³ Ecosoc, 2002

⁴ Khor, M. 2001. *Globalisation and the Crisis of Sustainable Development*. Environment and Development Series No.1. Penang, Third World Network.

dasan untuk mengatur MNC. Badan ini tengah mempersiapkan rumusan kode etik bagi MNC ketika akhirnya ditutup.

- d) Negara Utara, terutama Amerika Serikat (AS), menolak mengubah gaya hidup mereka menuju konsumsi yang berkelanjutan. Pada perundingan KTT Bumi, Presiden George Bush Sr. terkenal dengan pernyataannya bahwa "Gaya hidup orang AS tidak dapat dinegosiasikan".
- e) Komitmen negara Utara maupun negara sedang berkembang (Selatan) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pada dasarnya lemah. Negara Selatan, misalnya, tidak mau menghambat pertumbuhan ekonomi ataupun kesempatan membangun, sehingga enggan melaksanakan kebijakan pelestarian lingkungan, yang berarti menghemat penggunaan sumber daya alam. Negara Utara juga menolak melaksanakan langkah-langkah yang menuju pada pengamanan lingkungan; misalnya mereka menolak meregulasi arus perdagangan bahan berbahaya ke negara Selatan, menghentikan proyek yang merusak lingkungan di negara Selatan, dan juga melaksanakan regulasi ketat terhadap pengembangan rekayasa genetik, ataupun pengurangan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global.

Walaupun demikian, harus diakui bahwa proses dan hasil KTT Bumi telah menghasilkan suatu dasar bagi penyelesaian krisis lingkungan dan sosial. Dari segi proses, keterlibatan berbagai kelompok non pemerintah dan interaksi mereka dengan pemerintah meletakkan dasar bagi kemitraan yang berlangsung

hingga pelaksanaan WSSD. Sementara berbagai kesepakatan yang dihasilkannya tetap relevan untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Artinya "Semangat Rio" patut dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu semangat Rio yang penting adalah kemitraan dalam bentuk prinsip "tanggung jawab bersama tetapi berbeda" (*common but differentiated responsibility*). Prinsip ini mengakui bahwa negara Utara lebih bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan pada masa lalu maupun saat ini, dan karena juga mempunyai sumber daya lebih banyak, harus memikul tanggung jawab lebih besar pula dalam menyelesaikan persoalan lingkungan global. Negara Selatan, justru mengalami masalah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya akibat arus sumber daya ke Utara, hutang dan harga komoditi yang tidak adil di pasar internasional. Karena itu Selatan harus lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan mengubah pola pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan. Prinsip ini ternyata tinggal prinsip tanpa pelaksanaan yang jelas.

Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Vs. Globalisasi

KTT Bumi dilaksanakan pada saat paradigma globalisasi, terutama berkaitan dengan liberalisasi ekonomi mulai menguat dan mengalami perkembangan pesat. Salah satu bagian penting adalah Putaran Uruguay mengenai perdagangan yang berlangsung di bawah kerangka *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Putaran Uruguay adalah perundingan mengenai perdagangan internasional dengan paradigma globalisasi ekonomi. Putar-

an Uruguay melahirkan berbagai kesepakatan mengenai liberalisasi perdagangan yang akan dilaksanakan atau difasilitasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dibentuk pada 1994, dua tahun setelah KTT Bumi.

Paradigma pembangunan berkelanjutan yang digagas di Rio harus bersaing dengan semakin kuatnya paradigma globalisasi, terutama ketika sebagian isu globalisasi mengalami institusionalisasi di dalam beberapa perjanjian WTO. Memang banyak kesepakatan WTO yang bertolak belakang dengan kesepakatan Rio⁵. Contoh paling baik adalah dilemahkannya proses alih teknologi yang disyaratkan di dalam Agenda 21 maupun perjanjian lingkungan multilateral (MEA—*Multilateral Environmental Agreement*) oleh perjanjian TRIPS (HaKI terkait perdagangan) di bawah WTO. TRIPS mensyaratkan penguatan rejim peraturan HaKI bagi negara anggota WTO sehingga dapat dan memang sudah menghambat alih teknologi (termasuk teknologi yang berwawasan lingkungan atau yang diperlukan bagi pembangunan berkelanjutan).

TRIPS juga memicu persoalan akses obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan publik karena diberlakukannya ketentuan paten bagi obat-obatan, termasuk obat esensial serta obat untuk HIV/AIDS. Dalam konferensi AIDS internasional baru-baru ini di Barcelona, Spanyol, aktivis kemanusiaan melancarkan aksi protes menuntut agar negara-negara kaya menghapuskan peraturan paten bagi obat AIDS atau membolehkan pengembangan obat generik di Selatan agar orang miskin yang

menderita AIDS tetap dapat menjangkau harga obat. Dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-4 WTO di Doha, 2001, masalah ini menjadi salah satu mata perundingan alot dan berakhir dengan kesepakatan agar pelaksanaan TRIPS tidak menghambat negara anggota memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun esensi perjanjian TRIPS tetap belum berubah.

Selain itu, WTO mempunyai sistem penyelesaian sengketa lengkap dengan sanksi dan retaliasi sehingga kesepakatan WTO mempunyai daya pelaksanaan (*enforcibility*) yang kuat. Sebaliknya, perjanjian KTT Bumi, tidak dibarengi dengan sistem penegakan yang kuat. Karena itu para pemerintah cenderung lebih memilih melaksanakan perjanjian WTO ketimbang kesepakatan Rio. Sebagai contoh, menurut *WorldWatch Institute* (2002), saat ini ada lebih dari 500 perjanjian lingkungan, tetapi sedikit saja yang mengandung target dan jadwal yang spesifik, kebanyakan menyajikan ketentuan yang lemah untuk pemantauan dan pelaksanaan. Sebaliknya, dalam perundingan beberapa MEAs, banyak negara Utara seringkali menolak gagasan mengadakan langkah perlindungan lingkungan yang ketat, karena khawatir akan merugikan perusahaan MNC di negara mereka. Negara Utara seringkali mengatakan bahwa tindakan perlindungan lingkungan harus sesuai dengan peraturan liberalisasi perdagangan di dalam WTO.

Menurut Khor (2002), direktur *Third World Network*, globalisasi dalam bentuk liberalisasi keuangan juga menyumbangkan pada krisis finansial di banyak negara dari Meksiko hingga Rusia, termasuk Indonesia. Hal ini tentu saja mempengaruhi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan karena menimbulkan defisit

⁵ Jhamtani, H. 2002. Jalan Panjang Rio 1992 menuju Johannesburg 2002. Wacana. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Edisi 12, Tahun III, 2002. Yogyakarta, Insist Press.

anggaran dan pembengkakan hutang. Globalisasi teknologi, terutama teknologi yang belum dikaji keamanannya (termasuk rekayasa genetik) juga berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Semangat Rio tidak pernah mendapat kesempatan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Hanya lima negara Utara yang memenuhi target 0,7% dari GNP sebagai bantuan melaksanakan Agenda 21. Alih teknologi tidak pernah terjadi. Komitmen memperbaiki lingkungan tidak pernah dilaksanakan. Bahkan AS menolak kesepakatan Protokol Kyoto sebagai peraturan pelaksanaan bagi Konvensi Perubahan Iklim, karena memuat target waktu dan penurunan emisi gas rumah kaca yang jelas. Protokol Cartagena untuk Keamanan Hayati, yang merupakan peraturan turunan dari Konvensi Keragaman Hayati, terancam gulung tikar karena belum cukupnya jumlah negara yang meratifikasinya. Padahal protokol ini penting untuk melindungi keragaman hayati dari kemungkinan dampak negatif bioteknologi modern yang sekarang marak dikembangkan dan dipasarkan.

Pada tingkat institusi internasional, PBB, organisasi yang diberi mandat mengatur pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui *Commission on Sustainable Development* (CSD) yang dibentuk di KTT Bumi, mengalami proses pelemahan karena negara Utara menolak membayar penuh iuran mereka. PBB juga tidak mendapatkan dukungan politik dari negara maju. Sebaliknya, institusi keuangan seperti IMF dan Bank Dunia, atau institusi perdagangan seperti WTO semakin dipentingkan oleh Utara sebagai organisasi yang mengatur pembangunan internasional. Padahal institusi

tersebut tidak menganut paradigma pembangunan berkelanjutan. PBB sekarang dipaksa mengandalkan diri pada MNC, dan mulai meninggalkan semangat melayani rakyat dunia sesuai traktatnya. Dalam situasi inilah, WSSD dilaksanakan sebagai KTT Bumi Kedua, untuk memberikan kesempatan kedua kepada dunia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

WSSD dan Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan

WSSD menghasilkan tiga dokumen: pertama Rencana Implementasi (**Plan of Implementation**), deklarasi Johannesburg yang merupakan komitmen politik terhadap Rencana Implementasi dan Rencana Kemitraan di bidang air, energi, kesehatan, pertanian, keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem (disingkat WEHAB – *Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity and Ecosystem Management*).

Rencana Implementasi mempunyai dua sisi⁶. Pada satu sisi, ada beberapa hal yang menjanjikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pertama, ada target waktu yang jelas untuk hal-hal penting seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan sanitasi, pengurangan kerusakan pada perikanan, pengelolaan bahan kimia dan pengurangan kehilangan keanekaragaman hayati. Kedua, ada pengakuan bahwa globalisasi menimbulkan masalah bagi banyak negara berkembang, terutama berkaitan dengan krisis keuangan serta ketidaksetaraan. Ketiga, ada upaya lebih jelas

⁶ Bagian ini dianalisis berdasarkan partisipasi penulis dalam berbagai sidang persiapan WSSD dan pada saat sidang WSSD.

untuk menangani persoalan hutang negara berkembang. Keempat ada pula pernyataan bahwa arsitektur keuangan global perlu direformasi agar lebih mementingkan pembangunan di negara sedang berkembang. Kelima, ada diskursus tentang perlukan tanggung jawab korporasi dan keenam, ada upaya baru mengenai penguatan institusi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional, walaupun tetap belum dapat dikatakan memperkuat PBB.

Tetapi di sisi lain, ada banyak kelemahan pula. Bahasa yang digunakan tidak cukup kuat, hanya berisi retorika seperti "mendorong", "mempertimbangkan", "memperkuat", "meningkatkan". Kedua, dalam hampir setiap bagian mengandung kata-kata "mempromosikan kemitraan publik-swasta". Ini adalah kata kunci bagi privatisasi atau dominasi perusahaan swasta dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, tidak ada kemajuan berarti dalam berbagai aspek karena beberapa rencana implementasi diambil dari kesepakatan internasional yang sudah ada. Misalnya, target pengurangan kemiskinan diambil dari Deklarasi Millenium PBB, kesepakatan energi diambil dari beberapa konferensi Para Pihak pada Konvensi Perubahan Iklim, masalah pendanaan pembangunan diambil dari Konsensus Monterrey tentang Pembiayaan Pembangunan, dan beberapa pernyataan tentang perdagangan diambil dari Konferensi tingkat Menteri IV WTO. Seyogyanya, WSSD mengambil langkah lebih maju, tetapi tidak ada komitmen konkrit. Misalnya KTM IV WTO menyatakan akan mengurangi dan lambat laun menghapus subsidi dan hambatan ekspor bagi produk pertanian. Negara berkembang berha-

rap akan ada rencana lebih maju, karena subsidi tersebut lebih banyak diberikan oleh negara maju kepada petani mereka sehingga mendistorsi harga di tingkat internasional. Tetapi Uni Eropa menolak hal tersebut sehingga bahasa yang digunakan tetap bahasa dari KTM IV WTO. Sebaliknya, demikian pula masalah hutang, negara berkembang menginginkan rencana yang lebih konkrit, tetapi negara maju hanya mau menggunakan bahasa dari Konsensus Monterrey.

Selanjutnya, target mengenai hal-hal penting juga gagal disepakati. Yang terutama adalah target mengenai perubahan ke arah produksi yang lebih ramah lingkungan, target mengurangi emisi gas rumah kaca, target untuk beralih secara perlahan ke pemanfaatan sumber energi terbarukan, target mengenai pengurangan subsidi yang mendistorsi pasar dan menimbulkan kerusakan lingkungan, dll. Juga tidak ada janji untuk meningkatkan sumber daya keuangan, sementara keputusan tentang alih teknologi juga tidak terlalu kuat. Dengan kata lain, Rencana Implementasi ini dapat dikatakan bersifat "status quo".

Terlepas dari kekuatan dan kelemahan, beberapa hal patut dicatat. Pertama proses perundingan WSSD dibayang-bayangi oleh KTM IV WTO dan Konsensus Monterrey, sehingga hampir kehilangan nuansa pembangunan berkelanjutan. Kedua, yang terselamatkan di dalam WSSD hanyalah proses multilateral, kalau WSSD gagal mencapai kesepakatan maka dikhawatirkan dunia akan kehilangan kepercayaan pada proses multilateral. Hal ini seringkali membuat negara berkembang melepaskan posisi mereka, ketimbang menggagalkan proses, karena negara berkem-

bang lebih memerlukan proses multilateral ketimbang negara maju, dan menyelamatkan proses PBB menjadi lebih penting lagi, karena negara berkembang masih mempunyai suara cukup kuat dibandingkan di dalam lembaga internasional lainnya. Keempat, selama proses perundingan terlihat bahwa komitmen para pemerintah, baik dari negara maju maupun negara berkembang, terhadap pembangunan berkelanjutan sangat lemah. Dapat dikatakan hanya Uni Eropa dan Norwegia yang masih mempunyai agenda lingkungan. Kelima, kalau pemerintah dapat mengabaikan pelaksanaan hasil KTT Bumi yang dianggap sebagai tonggak sejarah, maka tidak ada jaminan bahwa hasil WSSD akan diimplementasikan, karena memang tidak ada sesuatu yang mengikat secara hukum. Keberhasilan WSSD bukanlah dalam menghasilkan dokumen, tetapi dilihat dari apakah yang tertera di dalam dokumen akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal terakhir, maka WSSD mengeluarkan daftar komitmen kemitraan (sering disebut sebagai *type 2 outcome*). Ada sejumlah program kemitraan beserta jumlah dolar yang dijanjikan akan dilaksanakan setelah WSSD. Salah satunya, menyediakan dana bagi *Global Environmental Facility* (GEF—yang dibentuk pada KTT Bumi 1992 sebagai mekanisme pendanaan hasil KTT Bumi) sebesar US\$3 milyar. Namun Ornop mengkritik inisiatif ini karena tidak menjawab komitmen perubahan struktural, dan didominasi oleh perusahaan multinasional yang justru menjadi bagian dari masalah.

Sebagai penutup, konsep dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mengalami beberapa hambatan konseptual. Hambatan perta-

ma adalah keengganan para pemerintah dan lembaga internasional untuk secara sungguh-sungguh mengubah sistem internasional yang ada, baik di lembaga keuangan (seperti IMF dan Bank Dunia), perdagangan (WTO) maupun di PBB sendiri. Hambatan kedua adalah komitmen politik para pemerintahan amat lemah karena tetap lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi ketimbang keseimbangan antara ekonomi, sosial dan ekologi. Hambatan konseptual terbesar adalah globalisasi yang didominasi oleh perusahaan multinasional, yang menggusur agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional. Penggusuran ini dilakukan atas nama "kemitraan."

Melemahnya PBB merupakan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, karena PBB adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai mandat pembangunan berkelanjutan, dan mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi negara berkembang lebih besar dibandingkan institusi lain. Demikian pula, keterlibatan Ornop serta unsur masyarakat lebih dimungkinkan di dalam PBB ketimbang organisasi multilateral lain. Karena itu agenda PBB masih dapat dipengaruhi oleh Ornop dan kalangan non-pemerintah, seperti terlihat adanya dialog multipihak pada saat WSSD.

Akhirnya, pembangunan berkelanjutan hanya akan terwujud jika berbentuk gerakan yang dilandasi oleh kerjasama murni dan setara oleh berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional. Selama belum ada upaya mengatasi kesenjangan struktural, terutama di tingkat internasional, maka pembangunan berkelanjutan hanya akan tinggal jadi harapan yang sulit untuk menjadi kenyataan.